

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan terkait fokus dan sub fokus penelitian bahwa:

1. Proses Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Kota Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permensos No. 2 Tahun 2019 tentang bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama untuk penanganan fakir miskin. Dari hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan bantuan sosial melalui program kelompok usaha bersama (KUBE) di kecamatan Kota Selatan sudah berjalan dengan prosedur yang berlaku, hal ini ditinjau dari proses verifikasi berkas, penyaluran bantuan KUBE, evaluasi dan monitoring namun jika ditinjau dari proses penetapan penerima dan sosialisasi masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya ketepatan sasaran dalam penetapan penerima bantuan dan masih kurang pengetahuan masyarakat mengenai program KUBE, sehingga hal – hal tersebut perlu lebih diperhatikan oleh penyelenggara program agar proses implementasi kebijakan bantuan sosial melalui program kelompok usaha bersama

(KUBE) di Kecamatan Kota Selatan dapat berjalan dengan maksimal sehingga akan berdampak positif kepada masyarakat.

2. Faktor – Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Program Impementasi Kebijakann Bantuan Sosial Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Kota Selatan sudah dilaksanakan dengan prosedur yang berlaku. Hal ini ditinjau dari faktor sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, namun masih terdapat kendala pada faktor komunikasi, dimana masih ada masyarakat yang belum memahami mengenai program KUBE yang dijalan di Kecamatan Kota Selatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapanagan peneliti dapat memberikan saran bahwa:

1. Proses Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kota Selatan. Dalam proses impelementasi program KUBE yakni perlu adanya keterlibatan pemerintah kota dan Dinas Sosial dalam hal penetapan calon penerima bantuan KUBE dan juga komunikasi yang dijalin oleh perancang program dan penyelenggara program harus sejalan sehingga masyarakat mudah untuk mengerti program yang di implementasi kepada masyarakat.

2. Faktor–Faktor yang Menentukan Keberhasilan Program Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Kota Selatan. Dalam hal ini dari pihak penyelenggara program yang menjadi pemateri mempunyai pengetahuan yang luas mengenai program KUBE sehingga masyarakat dapat mudah mengerti dengan program KUBE, adapaun saran lain yang dapat peneliti berikan yaitu mengenai kebijakan yang dilakukan dalam proses penilain, agar kiranya pihak pembuat kebijakan dapat mengkaji ataupun melihat urgensi dalam proses penilaian sehingga jika terdapat anggota kelompok yang mengalami kemajuan usahnya akan diberikan bantuan lagi sehingga tidak akan terhambat dengan anggota kelompok yang tidak mengalami kemajuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo (2006). Politik dan Kebijakan Publik. Penerbit AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad, Bandung
- Afandi, I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 54-65.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firdaus, R. (2018). Konten Kebijakan sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) di Kabupaten Luwu. *Journal I La Galigo/ Public Administration Journal*, 1(1), 16-23.
- Hendrikus, M. B. (2016). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama. *Tugas Akhir Program Magister. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Universitas Terbuka*
- Irwansyah, L. (2016). Kemiskinan, Keluarga Dan Prostitusi Pada Remaja. *Psychology and Humanity*, 2, 19-20.
- Kuncoro, S. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009– 2011. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. *Gorontalo: UNG Press Gorontalo*.
- Miles, M. H dan M. B. (2009), Analisis Data Kualitatis. UI-Press.
- Muhiddin, A. (2017). *Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa)* (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. In XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, A. F. P., Nawawi, J., & Rahmatullah, R. (2014). Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan pada program UEP dan KUBE. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 7(2), 127-136.

- PROVINCE, S. S. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Polongbangkeng Utara.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Saleh, M. (2014). *Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara (Studi pada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara)* (Doctoral dissertation, Universitas Terbuka).
- Suwitri, S. (2014). Konsep Dasar Kebijakan Publik MODUL 1. *Analisis Kebijakan Publik*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.12.054>
- Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Situmorang, C. (2016). *Kebijakan publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan, cet. I*. Depok: *Sosial Secururity Development Institute (SSID)*
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tika, F. Y. A. (2013). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Batu Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik, 1*(2), 188-196.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Penerbit Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2010). Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. In *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Wardhani, A. P., Hasiolan, L. B., & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. *Journal of Management*. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v19i1.34>

- Wulan, Y. C., Ati, N. U., & Widodo, R. P. (2019). Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi kelompok usaha bersama (kub). *Jurnal respon publik*.
- Yasa, I. G. D., & Sandiasa, G. (2018). Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Locus*.
- Zulkarnain, T. A., Heriyanto, M., & Yuliani, F. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN. *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)*, 1(1), 10-18.